BAB III

PARTAI ISLAM DAN FENOMENA KANIBALISME

A. Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam

1. Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang atau PBB adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam. Didirikan pada tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriyah yang bertepatan pada 17 Juli 1998 Masehi di Jakarta, dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta. Partai ini berlambang "Bulan Bintang" berwarna emas di atas dasar warna hijau dan di bawahnya dibubuhi tulisan berbunyi "PARTAI BULAN BINTANG".[1]

Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII),

[1]DPP PBB, " Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang", http://bulan-bintang.org/partai/ad-art-pbb/ (31 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Berbagai ormas ini bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi yaitu DR.H. Mohammad Natsir, Prof.DR.HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

Pada awal berdirinya PBB diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang mempelopori Amandemen Konstitusi Pasca reformasi ditengah tuntutan Federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu dan pernah pula menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan MS. Kaban diangkat sebagai Sekretaris Jendral, tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para cukong kayu dan perambah hutan Indonesia. Berikutnya MS.Kaban dipilih sebagai Ketua Umum PBB pada tanggal 1 Mei 2005 dan Drs.H. Sahar L. Hasan sebagai Sekjen. Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali DR.H.MS Kaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Ketua Umum dan. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syuro dan BM Wibowo,SE., MM., mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai Sekretaris Jenderal.[2]

Basis massa sosial dari partai ini sebenarnya mengisyaratkan sebagai partai yang terbuka. Hal ini dapat diketahui dari keanggotaan dari partai ini. Dalam PBB, keanggotaan terdiri dari dua macam : Anggota biasa dan anggota khusus partai sesuai ketetapan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB. PBB memberi kesempatan pada seluruh warga Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah pernah menikah, pandai membaca dan menulis serta menyetujui Anggaran Dasar (AD) partai untuk menjadi anggota, setelah itu seseorang yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk membayar uang pangkal. Keanggotaan seseorang yang telah memenuhi persyaratan kemudian disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.[3]

Jika dilihat dari sistem keanggotaan tersebut, menunjukkan bahwa PBB merupakan partai yang terbuka yang tidak menutup pintu bagi orang-orang non-Muslim untuk bergabung, meskipun notabene ia merupakan partai Islam. Namun pada kenyataannya PBB sebenarnya menutup diri dari kalangan orang-orang yang non-Muslim. Inilah yang menyebabkan PBB tidak dapat disebut sebagai partai terbuka. Selain hal tersebut, asas dari partai yang tertuang dalam AD menyatakan bahwa partai ini berasaskan Islam membuat

[2]Rizal Aminuddin, *Wawancara*, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014
[3]DPP PBB, " Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang", http://bulan-bintang.org/partai/ad-art-pbb/ (31 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang non-Muslim berpikir lebih jauh.[4] Hal ini sesuai dengan keanggotaan PBB di Jawa Timur. Menurut Sekretaris DPW PBB Jawa Timur, Rizal Aminuddin, mengatakan :"Keanggotaan PBB memang seluruhnya Muslim karena sesuai dengan Anggaran Dasar partai asas dari PBB adalah partai Islam"[5]

Dengan demikian, basis massa dari PBB adalah dari kalangan umat Islam sendiri. dengan demikian, PBB tidak akan mendapatkan suara dari kalangan non-Muslim, dan yang perlu diketahui bahwa di Indonesia, umat Islam secara garis besar terbagi ke dalam dua kutub besar, yakni Muhammadiyah dan NU. Untuk NU, aspirasi politiknya telah tersalurkan melalui PKB dan sebagian PPP. Sementara warga Muhammadiyah yang terpecah secara politik, memberikan suaranya pada PAN, PKS, dan sebagian juga PPP. Selain itu, umat Islam dari kedua organisasi besar di atas, juga terdapat pemilih Islam dari golongan organisasi tersebut yang masih bingung menaruhkan politiknya kemana (swing voters), dari sisi inilah, PBB memiliki peluang untuk menarik dukungan.[6] Namun, untuk wilayah Surabaya dan Jawa Timur, PBB belum mampu meenarik suara dari kalangan baik Muslim maupun non-Muslim. Ini dapat dilihat dari perolehan suara dalam pemilu legislatif 2014 kemarin, PBB tidak berhasil mengantarkan wakilnya ke DPRD

[4] Nuruddin'ITR, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto, (Jakarta : LP3ES, 2003), hal 14-15
[5] Rizal Aminuddin, *Wawancara*, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014
[6] Nuruddin'ITR, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto... hal 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat I dan II. "Untuk wilayah Jawa Timur dalam Pileg kemarin, PBB memang kurang beruntung", kata Rizal Aminuddin.[7]

Partai Bulan Bintang sejak reformasi telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu tahun 1999, 2004 dan Pemilu tahun 2009. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7% dan dengan system *parliamentary threshold* 2,5% sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Namun PBB masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.[8]

Adapun setting atau lokus penelitian ini untuk partai PBB adalah dikantor DPW PBB Jawa Timur yang terletak di Jl. Pucang Adi No. 49 Surabaya. Secara struktur keorganisasian, DPW PBB tidak jauh berbeda dengan DPP PBB yang berada di Jakarta, hanya saja untuk Majelis Syura (sebagai lembaga tertinggi partai) di tingkat pusat. Sedangkan untuk di

[7] Rizal Aminuddin, *Wawancara*, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014
[8] DPP PBB, "Sejarah Singkat Partai", http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/ (06 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah DPW atau provinsi tugas Majelis Syura diberikan kepada Majelis Pertimbangan.

Di kantor DPW PBB, segala berkas kepartaian tersusun dengan rapi di suatu ruangan khusus yang memang disediakan sebagai tempat penyimpanan berkas-berkas kepartaian. Di dalam kantor atau yang lebih enak disebut rumah itu terdapat berbagai ruangan, diantaranya : ruang/kamar berkas kepartaian, ruang tamu (sebagai tempat yang digunakan untuk proses wawancara), beberapa ruang lain/kamar, dan dapur.[9]

Adapun yang menjadi narasumber atau informan untuk partai PBB adalah Rizal Aminuddin, sebagai Sekretaris dari DPW PBB Jawa Timur, dan Askhabul Mukminin, sebagai Ketua dari bagian bidang media.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS berdiri pada tanggal 20 Juli 1998 dengan nama awal Partai Keadilan (PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan

[9] Firdaus Ayu Palestina, *Observasi*, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).[10]

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiringterpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-

[10]DPP PKS, “Sejarah Ringkas PKS”, http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas (O6 Januari 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs (pejabat sementara) Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.[11] Namun karena terlibat suatu kasus, Lutfi Hasan Ishaq digantikan oleh Annis Matta sebagai Presiden PKS.[12]

Awalnya, basis massa atau sosial PKS adalah bersumber dari kelompok dari kampus-kampus yang mencurahkan kegiatan kemahasiswaannya bagi Islamisasi kampus. Sikap kesehariannya yang bersahaja, sopan, dan rajin beribadah serta cara berpakaian yang "tampak Islami" seringkali berdampak tudingan yang eksklusif terhadap upaya Islamisasi.[13] Ketertutupan ini lah yang kerap kali membuatnya disandangkan dengan paham wahabi. PKS dianggap sebagai Islam garis keras yang gemar "mengkafirkan" orang lain. Meskipun hal ini dibantah oleh PKS, namun seorang guru besar UIN Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa dalam Suara Muhammadiyah, PKS merebut masjid Muhammadiyah di daerah Sendang Ayu, yang dulunya damai dan tenang, setelah dimasuki PKS dan membawa isu-isu politik.[14] alasan awal ini lah

---

[11]*Ibid*
[12]Shidiq Baihaqi, *Wawancara*, Kantor DPW PKS Jawa Timur, 23 Desember 2014
[13]Nuruddin'ITR, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto... hal 91
[14]Zuly Qodir, HTI dan PKS Menuai Kritik : Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia, (Yogyakarta : JKSG, 2013), HAL 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian membuat warga Muhammadiyah kemudian banyak yang "menyeberang" ke PKS dan membuat keduanya berkanibalisme politik.

Meski untuk sekarang menurut kedua pemimpin baik PKS, yang diwakili oleh Siddiq Baihaqi, dan PAN yang siwakili oleh Kuswiyanto mengaku hubungna keduanya sudah membaik, terbukti dengan adanya pertemuan rutin antar partai Islam tiap satu bulan sekali.[15]

Adapun setting atau lokus penelitian ini untuk partai PKS adalah di kantor DPW PKS Jawa Timur yang terletak di Jl. Gayung Sari Barat 10 No. 33 Surabaya. Sama dengan PBB, secara struktur keorganisasian, DPW PKS tidak jauh berbeda dengan DPP PKS yang berada di Jakarta, hanya saja yang membedakan adalah jika PBB untuk tingkat pusat hanya memiliki Majelis Syura (sebagai lembaga tertinggi partai) di tingkat pusat, PKS selain Majelis Syuro memiliki Majelis Pertimbangan Partai (Untuk menetapkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro), dan Dewan Syariah (sebagai lembaga fatwa). Sedangkan untuk di wilayah DPW atau provinsi keterwakilan tetap menjadi tugas Majelis Syura, Majelis Pertimbangan, dan Dewan Syariah di tingkat pusat, namun untuk Dewan Syariah terdapat keterwakilan di tingkat wilayah.[16]

Di dalam kantor DPW PKS yang tersiri dari dua lantai ini, segala sesuatunya tertata dengan rapi dan bersih. Sebagai contoh : saat pertama peneliti memasuki kantor, peneliti disambut dengan *recepcionist* atau

[15] Shidiq Baihaqi, Kuswiyanto, *Wawancara*, Kantor DPW pks dan PAN Jawa Timur, 23 Desember 2014 dan 08 Januari 2015
[16] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima tamu dengan ramah, di lantai bawah terdapat sebuah ruangan rapat, dan disisi kanan luar terdapat ruang penerimaan tamu (tempat proses wawancara berlangsung), sedangkan di bagian luar terdapat toilet, dapur, dan musholla kecil.[17]

Adapun yang menjadi narasumber atau informan untuk partai PKS adalah Shidiq Baihaqi, selaku ketua dari bidang Humas dari DPW PKS Jawa Timur dan Rahmat Wahyudi selaku bidang administrasi DPW PKS Jawa Timur.

3. Partai Amanat Nasional (PAN)

Kehadiran PAN tidak bisa dilepas dari tokoh utamanya, Amien Rais. Kemunculan Amien Rais di pentas nasional juga tidak bisa dipisahkan dengan situasi rezim saat itu, Soeharto, yang telah mulai memerintah Indonesia sejak tahun 1965 atau resminya sejak tahun 1966. Diawal-awal kepemimpinannya Soeharto dipandang berhasil membawa Indonesia keluar dari kebangkrutan, namun tidak demikian di akhir kepemimpinannya. Soeharto begitu otoriter dan represif. Terjadi ketimpangan sosial dimana-mana, Korupsi dan nepotisme telah berurat berakar dan mencengkram jauh ke dalam watak aparat pemerintah, bahkan watak buruk ini merembet di kalangan swasta. Situasi inilah yang oleh para pakar memprediksikan sebagai bahaya serius yang mengancam bangsa ini. Di masa kepemimpinan Soeharto setiap persoalan diselesaikan dengan pendekatan senjata, sehingga dipermukaan kelihatannya aman

[17] Firdaus Ayu Palestina, *Observasi*, Kantor DPW PKS Jawa Timur, 23 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi di bawahnya bak api dalam sekam yang membara. Situasi di Aceh, Maluku, Irian Jaya (kini Papua) dan Timor-Timor adalah contoh betapa persoalan tidak pernah selesai. Pendidikan politik/demokrasi tidak berjalan, media masa dibatasi sehingga terjadinya kebodohan rakyat di tingkat bawah karena mereka menjadi miskin informasi. Di satu sisi berulang-ulangnnya keterpilihan Soeharto sebagai Presiden melalui MPR membuat kejenuhan politik di tanah air. Setiap MPR akan menggelar sidang Paripurna untuk memilih Presiden baru, sudah dipastikan Soeharto akan terpilih kembali, demikian juga dengan hasil Pemilu yang selalu dimenangkan oleh Golkar.[18]

Pada bulan Mei 1998 yang sangat menegangkan, muncul krisis moneter secara global. Sesuai namanya dimana-mana terjadi krisis ekonomi yang hebat, namun berbeda dengan Indonesia, di Negara lain krisis tersebut tidak sampai membuat Negara itu bangkrut. Hal ini disebabkan karena pondasi ekonomi Negara itu dibangun dengan sangat kuat. Di Indonesia pondasi ekonominya sangat rapuh sehingga ketika dilanda badai krisis, kehancuran ekonominya tidak dapat diperbaiki, kecuali membangunnya dari awal lagi. Parahnya lagi kehancuran ekonomi ini dibarengi dengan krisis politik dalam negeri. Dari krisis ekonomi dan krisis politik merembet ke krisis-krisis lainnya, seperti krisis moral, krisis budaya dan lain-lainnya, dan bukannya semakin reda tetapi semakin

[18]DPW PAN NTB, "Sejarah Singkat PAN", http://dpwpanntb.blogspot.com/2010/01/sejarah-singkat-pan.html (31 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membesar tanpa kendali sehingga krisis multidimensional inilah yang kemudian menjadi alasan kuat untuk menjatuhkan Soeharto. Demonstrasi setiap hari muncul dimana-mana seakan ada kekuatan spriritual yang sama menimpa seluruh otak rakyat Indonesia untuk meminta Soeharto mundur, akan tetapi keinginan itu tidak pernah terbuka, tidak ada seorangpun yang secara terbuka meminta Soeharto mundur karena takut diculik, ditahan tanpa proses pengadilan dan bahkan sampai penghilangan nyawa.

Setelah kejadian penembakan di Universitas Tri Sakti, yang menewaskan 3 orang mahasiswa, memberikan kekuatan untuk seorang Amien Rais, satu-satunya tokoh nasional saat itu yang secara terang benderang meminta Soeharto mundur. Maka suara lantang itu pun bergemuruh mewarnai dan menginspirasi para aktivis untuk menyuarakan hal yang sama. Ribuan perwakilan mahasiswa bercampur dengan para aktivis dan komponen-komponen lainnya menduduki gedung DPR/MPR. Dan diakhir cerita, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya (atau dalam bahasa yang ia pilih “berhenti”) sebagai Presiden RI dan selanjutnya diganti oleh wakilnya Prof. Dr. B.J. Habibie.

Di tengah-tengah kekalutan bangsa yang kian mencekam dan karena keberanian Amien Rais inilah yang menjadikannnya tercatat oleh sejarah sosial politik Indonesia modern sebagai tokoh reformasi garda depan. Banyak pihak yang memintanya menjadi pemimpin baru, baik sebagai pemimpin Negara maupun sebagai pemimpin partai politik yang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum itu, di Jakarta, tanggal 12 Mei 1998 dibentuk Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI) oleh para aktivis Islam. Badan yang beranggotakan 40 Ormas Islam (Persis, SI, Perti, Al-Irsyad dan KISDI) disponsori oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) untuk mendirikan partai baru yang berbasis eks Masyumi (Majelis Syuro Indonesia) yang sekarang kita kenal dengan nama PBB. Harapan tokoh-tokoh BKUI adalah agar Amien Rais bersedia menjadi pemimpinnya.

Rencana tersebut kemudian ditentang keras oleh teman-teman Amien Rais, terutama Dawam Rahardjo. Dawam lebih menginginkan membentuk partai baru yang terbuka dan plural, Dawam tidak ingin Amien terjebak dengan politik sektarianisme yang justeru akan memperkecil dirinya sendiri. Pada tanggal 14 Mei 1998, 50 tokoh nasional (informal leader's) diantaranya: Amien Rais, Gunawan Muhammad (Tempo), Emil Salim (mantan Menteri), Abdillah Toha (Pimp Majalah Ummat), A.M. Fatwa (Petisi 50 dan Tokoh Muhammadiyah), Faisal Basri (Eokonom UI), Albert Hasibuan (Praktisi Hukum), Dawam Raharjo (LP3ES), Toety Herati (LSM), Arbi Sanit (Dosen Ilmu Politik UI), Ismed Hadad (Aktivis Alumni HMI), Rizal Ramli (Ekonom), Zoemrotin, Arifin Panigoro (Pengusaha), Adnan Buyung Nasition (YLBH), Emha Ainun Najib (Budayawan), Muchtar Pabotinggi dan Sandra Hamid (sebenarnya ada Prof. Soemitro Djojohadikusumo – orang tuanya Prabowo Subianto - telah menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehadirannya tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, ia mengurungkan kehadirannya) melakukan pertemuan di Gallery Cemara.[19]

Pada Pemilu pertama PAN berhasil menempatkan 34 orang kadernya sebagai anggota DPR RI, sehingga PAN termasuk lima besar pemenang pemilu 1999. Tahun 2004 juga lima besar dengan 53 anggota. Sedangkan pada Pemilu 2009 berhasil menempatkan sejumlah orang kadernya di DPR. Dan dalam pemilu terakhir, yakni pemilu 2014 kemarin perolehan kursi DPRD Provinsi Jawa Timur sama juga dengan perolehan kursi pada Pemilu 2009, sebayak 7 kursi dan untuk DPRD Kota Surabaya sebnyak 4 kursi. Daerah pemilihan yang menyumbangkan kursi untuk DPRD Jawa Timur yakni Dapil Jatim I, Dapil Jatim VI, Dapil Jatim VII, dapil Jatim VIII, Dapil Jatim IX, Dapil Jatim X, dan Dapil Jatim XI. Sedang perlehan kursi untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota se Jawa timur sebanyak 122 kursi. Dibanding hasil pemilu 2009 turun lima kursi, karena pada Pemilu 2009 mendapat 127 kursi.

Namun bila dihitung perolehan suara Pemilu 2014 ini naik bila dibanding perolehan suara pada Pemilu tahun 2009. Kongres I dilkukan di Yogyakarta menetapkan Amien Rais sebagai Ketua Umum dan Hatta Rajasa sebagai Sekjen, sedangkan pada Kongres II di Semarang terpilih Soetrisno Bachir sebagai ketua Umum dan Zulkifili Hasan sebagai Sekjen. Sedangkan Kongres III di Batam terpilih secara aklamasi Hatta Radjasa

[19]Nuruddin'ITR, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta : LP3ES, 2003), hal 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Ketua Umum dan Taufiqurrahman sebagai Sekjen. Saingannya Hari Wibowo ditetapkan sebagai wakil ketua umum.[20]

Berbeda dengan PBB, PAN mengikrarkan diri sebagai partai yang terbuka dalam menerima anggotanya. PAN dapat menerima seluruh warga negara Republik Indonesia dengan catatan : yang bersangkutan telah dewasa, dan berjiwa reformis. Amin Rais sebgai tokoh sentral dalam partai ini diketahui merupakan mantan pemimpin organisasi terbesar kedua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Oleh karena itu, paham Muhammadiyah untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, selalu ia gunakan dalam proses politiknya, ia menyatakan bahwa kaca mata Al-Qur;an selalu digunakannya dalam melihat permasalahan bangsa Indonesia ini. Hal ini berbuah diterimanya Amin Rais dan PAN oleh warga Muhammdiyah. Walaupun demikian, menurut Hatta Rajasa, bahwa PAN memang secara garis besar para pendukungnya adalah Muhammadiyah, namun PAN bukanlah partainya Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah tidak berpartai, melainkan individu-individu Muhammadiyah itu sebagian besar menyalurkan aspirasinya melalui PAN. [21]

Adapun setting atau lokus penelitian untuk partai PAN adalah di kantor DPW PAN Jawa Timur yang terletak di Jl. Darmokali No. 66 Surabaya. Sama dengan PBB dan PKS secara struktur keorganisasian, DPW PAN

[20]DPW PAN NTB, "Sejarah Singkat PAN", http://dpwpanntb.blogspot.com/2010/01/sejarah-singkat-pan.html (31 Desember 2014)
[21] Nuruddin'ITR, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto.. hal 142-144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jauh berbeda dengan DPP PAN yang berada di Jakarta, yang membedakan adalah jika PBB untuk tingkat pusat hanya memiliki Majelis Syura (sebagai lembaga tertinggi partai) di tingkat pusat, PKS selain Majelis Syuro memiliki Majelis Pertimbangan Partai (Untuk menetapkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro), dan Dewan Syariah (sebagai lembaga fatwa). Sedangkan untuk di wilayah DPW atau provinsi keterwakilan tetap menjadi tugas Majelis Syura, Majelis Pertimbangan, dan Dewan Syariah di tingkat pusat, namun untuk Dewan Syariah terdapat keterwakilan di tingkat wilayah, sesangkan PAN memiliki Majelis Pertimbangan yang mewakili di tiap-tiap pimpinan organisasi (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting), dan khusus di Wilayah, PAN memiliki Dewan Penasihat Partai Wilayah (DPPW)[22]

Kantor DPW PAN Jawa Timur yang terletak di belakang Taman Bungkul ini terdiri dari dua lantai. Ukurannya yang besar menjadikan kantor ini memiliki ruangan yang besar juga ukurannya, seperti : musholla yang berdiri megah disamping luar kantor, 3 buah toilet, dapur. Sedangkan di bagian dalam terdapat ruang tamu, meja pimpong, dan dua buah ruangan, yang salah satunya merupakan ruang rapat (tempat proses wawancara berlangsung).[23]

Adapun yang menjadi narasumber atau informan untuk partai PAN adalah Kuswiyanto, selaku Sekretaris dari DPW PAN Jawa Timur, dan Wakil Sekretaris DPW PAN Jawa Timur, R. Suwasis Hadi.

---

[22]Kuswiyanto, *Wawancara*, Kantor DPW PAN Jawa Timur, 08 Januari 2015
[23]Firdaus Ayu Palestina, *Observasi*, Kantor DPW PAN Jawa Timur, 08 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser akibat desakan arus reformasi yang kuat. Mulai dari yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.[24]

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, H Abdul Aziz, Drs. H Andi

[24]Rahmat, "Hubungan antara PKB dan NU", https://gardarahmat010.wordpress.com/artikel/ (18 Januari 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 – 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:

Pokok-pokok Pikiran NU :

- Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.
- Kemudian, "efek es campur" dalam berpolitik ini akan memberi dampak tertentu dalam mengembangkan visi dan misi di dalam suatu partai politik.[25]

Setting atau lokus penelitian untuk partai PKB adalah di kantor DPW PKB Jawa Timur yang terletak di Jl. Ketintang Madya 153-155 Surabaya. Sama dengan PBB, PKS, dan PAN secara struktur keorganisasian, DPW PKB tidak jauh berbeda dengan DPP PKB yang berada di Jakarta, yang membedakan adalah jika PBB untuk tingkat pusat hanya memiliki Majelis

[25]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syura (sebagai lembaga tertinggi partai) di tingkat pusat, PKS selain Majelis Syuro memiliki Majelis Pertimbangan Partai (Untuk menetapkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro), dan Dewan Syariah (sebagai lembaga fatwa). Sedangkan untuk di wilayah DPW atau provinsi keterwakilan tetap menjadi tugas Majelis Syura, Majelis Pertimbangan, dan Dewan Syariah di tingkat pusat, namun untuk Dewan Syariah terdapat keterwakilan di tingkat wilayah, PAN memiliki Majelis Pertimbangan yang mewakili di tiap-tiap pimpinan organisasi (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting), dan khusus di Wilayah, PAN memiliki Dewan Penasihat Partai Wilayah (DPPW). Sedangkan PKB untuk majelis tertingginya dipegang oleh Mustasyar yang bertugas memberikan nasihat-nasihat pada Majelis Syura dan Dewan Tanfidz[26]

Visi kebangsaan dan nasionalisme PKB, memberanikan partai ini untuk membuka pintu lebar-lebar bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi anggota partai. PKB tidak mensyaratkan Islam sebagai syarat keanggotaan, meskipun secara mendasar ia merupakan partai yang dibangun oleh warga NU yang notabene adalah menganut agama Islam.[27] Ini sesuai dengan yang diutarakan oleh narasumber, Fauzan Fuadi :

> Yang perlu diklarifikasi dan digaris bawahi adalah PKB sebenarnya bukan partai Islam, melainkan partai terbuka karena ada di sebagian wilayah Indonesia, seperti Papua dan NTB, pengurusnya adalah dari kalangan non-

[26]Badrut Tamam, *Wawancara*, Lobby Empire Palace, 23 Desember 2014
[27]Nuruddin'ITR, *Peta islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta : LP3ES, 2003), hal 116-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim. Ini dikarenakan PKB adalah partai terbuka yang berdasarkan nasionalisme dan dasar negara Pancasila.[28]

Kantor DPW PKB Jawa Timur yang terletak di dekat kampus UNESA ini memiliki ukuran yang lumayan besar. Tampak dari depan peneliti disambut oleh *security dan recepsionist* kemudian dipersilahkan memasuki sebuah ruang tamu dan bertemu dengan *mbak* Iffah, salah satu anggota DPW PKB. Dari *mbak* Iffah ini kemudian peneliti disarankan untuk menemui narasumber atau informan, Fauzan Fuadi, S.Ikom selaku Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB dan Badrut Tamam. S.Psi, selaku Wakil Bendahara Dewan Tanfidz PKB, yang juga menjadi ketua fraksi DPR PKB Jawa Timur.[29]

5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam." PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang

[28]Fauzan Fuadi, *Wawancara*, Lobby Empire Palace, 23 Desember 2014
[29] Firdaus Ayu Palestina, *Observasi*, Kantor DPW PAN Jawa Timur, 18 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah :

KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie.

PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. [30]

[30]DPP PPP, "PPP dalam Lintasan Sejarah", http://ppp.or.id/page/ppp-dalam-lintasan sejarah/index/ (18 Januari 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: "Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata'ala*." Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden. Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984.

Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP. Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994. Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.

Selanjutnya, Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung. PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik. 1.Pada Pemilu 1977 PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen). Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan.

2.Pada Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26,11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan. 3.Pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara arau 15,97 persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25 persen dari 400 kursi yang diperebutkan. 4.Pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50 persen dari 400 kursi yang diperebutkan. 5.Pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi yang diperebutkan. 6.Pada Pemilu 1999 PPP meraih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. 7.Pada Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 atau 8,14 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi atau 10,54 persen dari 550 kursi yang diperebutkan. 8.Pada Pemilu 2009 PPP meraih 5,5 juta suara atau 32 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan.

Daerah yang memberikan konstribusi perolehan kursi atau sebaliknya tidak memberikan konstribusi kursi bagi PPP adalah: 1.) Pada Pemilu 1977, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 84,62 persen dari 26 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. 2.) Pada Pemilu 1982, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur. 3.) Pada Pemilu 1987, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur. 4.) Pada Pemilu 1992, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur. 5.) Pada Pemilu 1997, PPP meraih kursi pada 18 provinsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur. 6) .Pada Pemilu dipercepat tahun 1999, PPP meraih kursi pada 24 provinsi atau 88,88 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Bali, Irian Jaya, dan Timur Timur. 7.) Pada Pemilu 2004, PPP meraih kursi pada 23 provinsi atau 69.69 persen dari 33 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Babel, Kepri, DIY, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua. Sedangkan pada pemilu 2014 kemarin untuk wilayah Jawa Timur, PPP mendapatkan jatah kursi sebanyak 5, dan memperoleh 1 kursi untuk kota Surabaya.[31]

Banyak yang berpandangan bahwa PPP hanya didirikan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pandangan itu secara *de jure* salah besar. Secara *de jure*, AD/ART PPP tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP. AD/ART hanya menyebut bahwa PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik. Ini berarti para tokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART itu yang sejak dulu sampai kini tidak pernah diubah secara substansial menyadari bahwa selain empat partai politik yang berfusi itu, masih ada organisasi Islam yang menjadi

[31]Husni Tamrin, Wawancara, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 09 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung dari keempat partai politik itu yang harus dimasukkan sebagai pendiri PPP.[32]

Untuk basis massa, sama halnya dengan PBB, PPP juga mengunci pintu bagi masuknya anggota yang non-Muslim, karena dalam AD/ART PPP mencantumkan bahwa Islam merupakan asas dari partai ini, dan melandaskan perjuangannya pada nilai-nilai ajaran Islam. Lebih dalam lagi, PPP bertekad untuk memelihara, mempertahankan, dan melestarikan jiwa dan semangat religius Islami sebagai nilai dasar, dan sikap mental.[33] Cita-cita PPP ini di-*amini* oleh Amar, bahwa "PPP lahir berdasarkan Islam dan selamanya itu tidak akan pernah berubah, jadi baik anggota maupun caleg yang ingin bergabung dengan PPP harus beragama Islam."[34]

#Setting atau lokus penelitian untuk partai PPP adalah di kantor DPW PPP Jawa Timur yang terletak di Jl. Raya Kendang Sari No. 36 Surabaya. Sama dengan PBB, PKS, PAN, dan PKB secara struktur keorganisasian, DPW PPP tidak jauh berbeda dengan DPP PPP yang berada di Jakarta.[35]

Kantor DPW PPP Jawa Timur yang terletak di belakang kampus UIN Sunan Ampel ini berdiri dengan cukup megah. Tampak dari depan peneliti dikagumkan dengan mobil ambulance milik DPW PPP yang menandakan bahwa DPW PPP memiliki program yang baik tentang kesehatan. Adapun narasumber atau informan dari partai ini adalah : Bpk. Husni Tamrin,

[32]DPP PPP, "PPP dalam Lintasan Sejarah", http://ppp.or.id/page/ppp-dalam-lintasan sejarah/index/ (18 Januari 2015)
[33] Nuruddin'ITR, *Peta islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta : LP3ES, 2003), hal 178
[34] Amar, *Wawancara*, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 16 Januari 2015
[35] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, dan Amar, sebagai Wakil Sektretaris DPW PPP Jawa Timur.[36]

B. Posisi Partai Islam dalam Pemilu 2014

Dalam pemilu legislatif pada tanggal 09 April 2014 kemarin, untuk wilayah Surabaya,Jawa Timur, masing-masing partai Islam diketahui hasil sebagai berikut :[37]

(Tabel. 3.1 : Posisi Partai Islam dalam Pemilu 2014 di Kota Surabaya, Jawa Timur)

Nama Partai	DAPIL 1	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	DAPIL V	Perolehan Kursi DPRD I	Perolehan Kursi DPRD II
PBB	1.174%	1.213%	2.352%	1.396%	1.135%	0	0
PKS	13.574%	13.554%	12.902%	14.613%	14.293%	6	5
PAN	13.401%	19.818%	12.279%	16.290%	12.115%	7	4
PPP	34.790%	9.272%	9.618%	5.694%	7.534%	5	1
PKB	28.443%	18.766%	25.769%	22.045%	24.718%	20	5

Sedangkan untuk posisi partai Islam di pentas nasional dengan partai nasionalis menurut hasil rekapitulasi KPU adalah sebagai berikut :[38]

[36] Firdaus Ayu Palestina, *Observasi*, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 16 Januari 2015
[37] Husni Tamrin, Wawancara, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 19 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Tabel. 3.2 : Perolehan Suara Partai Islam di Pentas Nasional)

Nama Partai	Banyaknya Perolehan Suara	Prosentase (%)
NASDEM	8.402.812	6,72
PKB	11.298.957	9,04
PKS	8.480.204	6,79
PDI-P	23.681.471	18,95
GOLKAR	18.432.312	14,75
GERINDRA	14.760.371	11,81
DEMOKRAT	12.728.913	10,19
PAN	9.481.621	7,57
PPP	8.157.488	6,53
HANURA	6.579.498	5,26
PBB	1.825.750	1,46
PKPI	1.143.094	0,91

Dari perolehan rekapitulasi di atas, diketahui bahwa partai Islam dalam pentas nasional hanya mampu meraih posisi ke lima, yakni diraih PKB dengan prosentase 9,04 %. Ini masih jauh perolehannya jika dibandingkan dengan empat partai nasionalis di atasnya, yaitu : PDI-P, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Apalagi empat partai Islam lainnya, seperti : PAN, PKS, PPP, dan

[38]Bilal Ramadhan, "Ini Hasil Lengkap Perolehan Suara Pileg 2014", http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/10/n5bgv5-ini-hasil-lengkap-rekapitulasi-perolehan-suara-pileg-2014, (26 Januari 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PBB yang perolehannya masih jauh tertinggal. Menurut lembaga survei LSI terdapat empat faktor penyebab penurunan elektablitas parpol Islam, *pertama*, yakni makin kentalnya fenomena "Islam Yes, Partai Islam No" atau dapat dikatakan mayoritas Islam di Indonesia tidak ingin partai dengan aroma Islam menjadi mayoritas. *Kedua*, yakni pendanaan politik partai Nasionalis lebih kuat daripada pendanaan politik pratai Islam. *Ketiga*, yakni munculnya anarkisme yang mengatasnamakan Islam oleh kelompok tertentu dinilai berdampak pada munculnya "kecemasan kolektif" masyarakat pada umumnya.

Keempat, yakni banyak tokoh-tokoh Islam yang diakomodasi oleh partai nasionalis baik ke dalam struktur partai maupun dalam rekruitmen anggota parlemen.[39] Namun demikian, menurut lembagai survei CSIS, perolehan total lima partai Islam pada pemilu 2014 naik menjadi 32 persen dari 26 persen pada tahun 2009. Beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan lebih dari 9 persen, dapat memainkan peran penting dalam membentuk koalisi setelah pemilihan umum presiden.[40]

---

[39]Gendhis, "LSI : Pemilu 2014 Dikuasai Nasionalis, Suara Partai Islam Turun", http://pemilu.seruu.com/read/2013/05/15/163693/lsi-pemilu-2014-dikuasai-nasionalis-suara-partai-islam-turun (26 Januari 2015)

[40]AFP, "Popularitas Partai Islam Naik pada PILEG 2014", http://www.voaindonesia.com/content/popularitas-partai-islam-naik-pada-pileg-2014/1891067.html, (26 Januari 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fenomena Kanibalisme Antar Partai Islam

Fenomena kanibalisme antar partai Islam peserta pemilu 2014, dapat dilihat dari perolehan suara yang di dapat pada pemilu 09 April kemarin. seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam pentas nasional, lima partai Islam hanya mampu mengantarkan satu wakilnya, yakni PKB untuk menjadi posisi lima besar, sedangkan empat partai Islam lainnya hanya mampu *survive* di posisi ke enam (PAN), tujuh (PKS), sembilan (PPP), dan ke sebelas (PBB).

Jika dilihat lebih dalam, perolehan suara yang di dapat oleh kelima partai Islam sesuai dengan analisis awal peneliti, bahwa adanya kesamaan basis massa mempengaruhi praktik kanibalisme politik antar partai Islam. Seperti : perolehan suara PKS yang berada tepat di bawah PAN, dan PKB yang mengungguli PPP, serta PBB yang jauh tertinggal karena tidak memiliki basis massa yang jelas seakan menjawab bahwa analogi kanibalisme antar partai Islam memang benar terjadi.

Namun demikian, untuk kondisi di wilayah Surabaya dan Jawa Timur, tampaknya kanibalisme antar partai Islam tidak menjadi hal yang signifikan, karena menurut hasil lapangan dari masing-masing DPW partai Islam, diperoleh data bahwa selain antar partai Islam, kanibalisme politik di wilayah Jawa Timur dan Surabaya kerap terjadi dengan partai nasionalis yang unggul di suatu wilayah tersebut. Seperti misalnya untuk PKS, menurut Shidiq Baihaqi :

> Memang kanibalisme antar partai yang memiliki basis massa sama itu juga terjadi di PKS. Pemilih tradisional PKS memang sama dengan PAN dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> PBB. Sesuai survei yang dilakukan lembaga survei independent PKS, pemilih PKS juga banyak yang di dapat dari mereka yang dulunya memilih PAN dan PBB kemudian berpindah memilih PKS. Namun hal tersebut tidak berlaku umum, untuk pemilu DPRD tingkat II (KabupatenKota) kekuatan figur caleg merupakan faktor utama penentu. Para pemilih (masyarakat) tidak memperdulikan citra, ideologi, maupun misi partai karena yang berlaku adalah *bolo dewe, konco dewe, tonggo dewe* (teman dan sahabat sendiri) dan dalam hal ini (politik lokal), kanibalisme politik terjadi bukan hanya antar partai Islam tapi justru antar partai Islam dan nasionalis. Karena adanya istilah *bolo dewe, konco dewe, tonggo dewe,* bisa saja PKS saling memangsa suara dengan Golkar, PDI-P, begitupun sebaliknya[41]

Senada dengan PKS, PAN yang diwakili oleh Kuswiyanto menyatakan bahwa :

> Semua partai pasti memiliki basis massa. Untuk PAN, memang dicitrakan basis massa Muhammadiyah karena salah satu pendiri PAN dulu adalah Muhammadiyah. Namun AD/ART PAN terbuka, dan anggota PAN juga banyak yang dari kalangan non-Islam dan non-Muhammadiyah, seperti : Tentara, orang yang bukan berasal dari kalangan religius, dari NU, bahkan dari kaum Nasrani. Namun untuk kanibalisme politik di DPRD tingkat I dan II, mangsa memangsa suara antar basis massa yang sama tidak selamanya, karena jika hanya mengandalkan basis utama maka PAN tidak akan besar. Oleh karena itu, saling mangsa memangsa antar partai nasionalis bisa saja terjadi, lebih kepada perseorangan atau profile caleg masing-masing. Sebagai contohnya adalah seperti yang terjadi di Dapil 4 , Chusnul Khotimah adalah caleg dari PDI-P yang berhasil mengalahkan PAN.[42]

PKB yang notabene berbasis massa ormas (organisasi masa) NU, diwakili oleh Fauzan Fuadi juga menegaskan bahwa :

> PKB bukanlah partai Islam, namun partai kebangsaan yang bernilai Islam. Adapun jika PKB memiliki jargon *Rahmatan Lil Alamin* itu adalah penegasan bahwa nilai keislaman yang dianut oleh PKB. Jika disandingkan dengan PPP, bahwa PKB memiliki basis massa yang sama, yakni kaum tradisionalis Nadhliyin, ya memang kita akui, namun perlu diketahui bahwa PPP bukanlah partai yang dilahirkan dari kaum Nadhliyin saja, melainkan partai yang berasal dari 4 fusi partai. Oleh karena itu, ya memang ada kanibalisme tetapi tidak mutlak dari sesama massa, karena itu tadi PPP dari sejarah berdirinya bukan dilahirkan hanya dari satu massa. Kita pun sendiri (PKB) jika dinilai suara kita diambil PPP dan PPP berhasil mengantarkan kadernya ke Kemenag, hal tersebut bukan suatu masalah yang besar, sebab masih banyak masyarakat yang memilih karena faktor psikologi, yang memang dari kecil dididik oleh keluarga NU yang taat kyai, pasti menaruhkan pilihannya di PKB, begitu pula dengan PPP.[43]

---

[41]Siddiq Baihaqi, *Wawancara*, Kantor DPW PKS Jawa Timur, 23 Desember 2014
[42]Kuswiyanto, *Wawancara*, Kantor DPW PAN Jawa Timur, 08 Januari 2015
[43] Fauzan Fuadi, *Wawancara*, Lobby Empire Palace, 23 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya faktor psikologi ini semakin dipertegas oleh narasumber kedua, yakni Badrut Tamam, S.Psi sebagai narasumber kedua, menyatakan bahwa faktor psikologi pemilih mendapat apa pada hari-H pemilihan itu yang lebih berperan terjadinya kanibalisme politik. :

> kalau menurut saya malah yang paling berpengaruh itu ya psikologi pemilihnya masing-masing, karena pemilih Indonesia sekarang jarang sekali yang melihat dari visi-misi, kebanyakan mereka memilih karena adanya imbalan dari para caleg tersebut. Jadi sangat bisa yang dimangsa suaranya itu bukan hanya dari PPP yang basisnya NU, tapi juga bisa dari semua kalangan partai baik Islam maupun nasionalis."[44]

Berbeda dengan PPP yang sejak awal berdirinya mengikrarkan diri sebagai partai Islam dengan jargon kembali ke rumah umat Muslim ini seakan sangat bangga dengan keislaman yang dimilikinya. Ini dibuktikan dengan tidak akan diterimanya anggota-anggota yang non-Muslim jika ingin bergabung atau bahkan mencalonkan diri menjadi caleg di PPP. Seperti kata narasumber kita, Amar : "karena kita (PPP) adalah partai islam, maka anggota kita pun juga harus dari kalangan Muslim, apalagi yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg melalui PPP."[45] Mengenai kanibalisme politik antar PPP dan PKB, jika PKB terlihat lebih santai, namun tidak dengan PPP. PPP mengakui dengan gamblang bahwa memang kanibalisme politik yang terjadi antara dirinya (PPP) dengan PKB memang benar terjadi adanya. Husni Tamrin menyatakan :

> Untuk di wilayah Surabaya dan Jawa Timur, memang PKB jauh lebih kuat dibanding dengan PPP, dan dampak persinggungan antar keduanya memang benar terasa, seperti : banyaknya pengurus DPRD sekarang wakil dari PKB dulunya merupakan mantan dari PPP, misalnya : Ali Yaqub dan Mustafa itu dulu orang PPP tapi loncat ke PKB.[46]

---

[44]Badrut Tamam, *Wawancara*, Lobby Empire Palace, 23 Desember 2014
[45]Amar, *Wawancara*, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 16 Januari 2015
[46]Husni Tamrin, Wawancara, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 09 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amar menambahkan bahwa :

> hal ini terjadi karena memang basis NU terbesar adalah di wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur, sedangkan di luar Jawa, biasanya kaum Nadhliyin meskipun mengaku orang NU, namun secara ideologi tidak sepenuhnya NU, hanya kulturnya saja seperti NU (melakukan slametan, tahlilan, dsb). Sedangkan PPP meskipun saat kelahirannya tidak terlepas dari peran NU, namun PPP belum mampu meyakinkan orang-orang NU untuk mempercayakan pilihan politiknya pada PPP. Ini juga berpengaruh karena memang PPP merupakan partai massa yang mengarah pada kader, tetapi lemah dalam pengkaderan. Itu masih dengan partai sesama Islam, kami kalah, apalagi dengan partai yang nasionalis, malah kami jauh tertinggal karena sistem, program, dan figur yang dimiliki partai nasionalis jauh lebih baik dari PPP."[47]

PBB yang memang sejarah kelahirannya tidak terpaku pada satu ormas pendukung, melainkan dari gabungan organisasi-organisasi mengaku bahwa jaminan untuk partai yang memiliki satu basis massa untuk selalu mendukung suatu partai, tidak selamanya berlaku demikian, Rizal menyatakan bahwa :

> PBB sejak awal berdiri yakni pada 17 Juni 1998 merupakan partai yang berasal dari ruh Masyumi dan sama sekali tidak bertumpu pada satu ormas. Namun PBB juga dibesarkan oleh beberapa ormas pendukung, seperti : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), dll. Namun saya juga tidak mengelak jika dalam pemilu itu terjadi perebutan massa, dan pada kenyataannya PBB yang memiliki lebih dari satu ormas pendukung di awal berdirinya juga tidak mampu membawa PBB memperoleh suara yang besar. Ini menurut paham saya yang lebih berpengaruh selain dari ormas pendukung adalah dari figur masing-masing caleg. Betapapun besarnya ormas yang mendukung jika partai tersebut tidak memiliki caleg yang mumpuni tentu tidak akan membawa partainya menjadi besar. Mungkin itu yang kami rasa kurang, karena secara sekretariatan, PBB sudah bagus, namun pemahaman masing-masing kader yang berbeda seakan tidak sesuai dengan cita-cita partai. Meski demikian, kita (PBB) masih memiliki wilayah unggulan, seperti di Madura, suara kita besar disana.[48]

---

[47] Amar, *Wawancara*, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 16 Januari 2015
[48]Rizal Aminuddin, *Wawancara*, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya basis massa PBB di Madura semakin dimantapkan oleh Askhabul Mukminin selaku narasumber kedua, ia menyatakan :

> Ya meski kita agak berduka dengan perolehan suara di pemilu kemarin, namun kita (PBB) masih punya basis massa yang kuat di Madura, dan itu yang perlu kita pertahankan, dan menjadi PR untuk terus melebarkan sayap bukan hanya di Madura, tentu saja dengan tidak meninggalkan asas keislaman PBB.[49]

Basis massa yang kuat untuk PBB di wilayah Madura ini menjadi bassis massa tradisional yang loyal hingga saat ini.

Selain hal tersebut di atas, di Jawa Timur, yakni pada TPS 41, kelurahan Wonokusumo, Surabaya, terdapat suatu kasus proses kanibalisme yang dilakukan antar partai Islam, yaitu : antara PPP, yang diwakili oleh caleg no.1 Buchori, dengan PAN, yang diwakili oleh caleg no.1, Fauzi. Kedua pasangan ini saling berlomba memperoleh suara tertinggi, dan diketahui Buchori melakukan *black campaign* atau kampanye hitam dalam kampanyenya. Dalam masa 3 hari minggu tenang, Buchori masih memasang pamflet bergambar dirinya di depan gapura sebuah gang, dan ia memberikan bantuan berupa pagar untuk beberapa wilayah di wonosari, kelurahan wonokusumo, dan jika pada wilayah tersebut hasilnya tidak memuaskan, ia akan mengambil kembali pagar tersebut. Sedangkan Fauzi, pada hari-H pemilihan memasang dua saksi (yang pertama sebagai saksi sah, yang kedua saksi pendukung yang tugasnya mencatat dan berbincang dengan dengan para pemilih)[50] "Entah apa yang dibicarakan", Kata Idris, selaku salah satu anggota KPPS 41.

---

[49]Askhabul Mukminin, *Wawancara*, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014
[50]Idris, *Wawancara*, Wonosari, Surabaya, 08 Februari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id